



**dpmp**ptsp  
BANYUMAS



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Banyumas

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Instansi Pemerintah yang secara substantif merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah digariskan dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bentuk analisa efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan tahun berjalan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki kearah yang lebih baik menuju kesempurnaan dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Purwokerto, 16 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyumas



Roni Hidayat, S.STP., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/c)  
NIP. 197609081996021003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumber daya yang dipergunakan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Peralihan Tahun 2024-2026 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai unsur pendukung tugas Bupati Banyumas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menyusun Perencanaan Strategis Peralihan. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja di atas tentu tidak terlepas dari dukungan dana, besaran anggaran yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Dari jumlah Anggaran Rp 9.882.647.332 telah terealisasi sebesar Rp 9.279.046.934 (93.89%), dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 603.600.398 (6,11%). Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 9.163.028.632 yang telah terpakai sampai dengan realisasi tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.615.478.584 (94.02%) dengan demikian terdapat sisa

sebesar Rp 547.550.048 (5,98%), sedangkan Jumlah Anggaran Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 719.618.700 yang telah terpakai sampai dengan realisasi tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 663.568.350 (92,21%) dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp 56.050.350 (7,79%).

Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja adalah:

1. Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal Indikator IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu satuan nilai Target 91.72, Realisasi 92.44 Tingkat Capaian 100.78 kategori Tercapai
2. Tujuan 2 Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, Indikator Nilai Investasi Daerah satuan milyar Target 1.694, Realisasi 3267.379 Tingkat Capaian 192.87%, Kategori Tercapai.

Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan perjanjian kinerja adalah:

1. Sasaran 1 Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal Indikator persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan satuan % target 99.83 Realisasi 100 Tingkat Capaian 100.17 Predikat Tercapai
2. Sasaran 2 Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya Indikator Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya satuan % target 93.75 Realisasi 111.59 Tingkat tingkat capaian 119.03 Predikat Tercapai

Hingga akhir Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran, 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, diperoleh rata-rata capaian kinerja sampai dengan bulan Desember Tahun 2025. Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai 109,37% yang dihitung dari 2 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran. Adapun capaian tujuan sebesar 102,34%, capaian sasaran sebesar 112,19%, capaian kinerja program sebesar 104,56%, capaian kinerja kegiatan sebesar 92,52%, dan capaian kinerja sub kegiatan sebesar 108,27%. Sementara itu, persentase realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 93.89%. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori Tercapai. sehingga Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pengukuran kinerjanya termasuk dalam kelompok kategori penilaian **Tercapai**.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	2
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Aparatur.....	5
E. Isu Strategis.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	9
C. Rencana Anggaran.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Analisis Capaian Kinerja	14
1. Tujuan 1.....	14
a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	14
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	16
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	17
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten sekitar (barlingmascakeb) .....	17
e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.....	18
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	19
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.....	19

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
2. Tujuan 2.....	21
a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	21
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	22
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	26
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	26
e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.....	27
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	28
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	29
3. Sasaran 1.....	30
a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	30
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	31
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	32
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten sekitar (barlingmascakeb) .....	32
e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.....	33
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	33
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
4. Sasaran 2.....	36

a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	36
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	37
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	38
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten sekitar (barlingmascakeb) .....	39
e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.....	40
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	41
C. Realisasi Anggaran.....	43
D. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran.....	46
E. Prestasi dan Penghargaan.....	49
F. Inovasi.....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	41
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....	52
B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis.....	53
<b>LAMPIRAN</b> .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyumas dirasakan semakin berat, karena dituntut untuk dapat menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif dan berdaya saing tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan melalui penyederhanaan birokrasi perijinan dan percepatan waktu penyelesaian yang memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa investasi (penanaman modal) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan untuk menarik penanaman modal menanamkan modalnya di kabupaten Banyumas, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan sesuai dengan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumber daya yang dipergunakan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

## **B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Kewenangan DPMPTSP Kab. Banyumas adalah pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejalan dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai:

1. Kedudukan:
  - a. DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
  - b. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Tugas:

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal sektor pembangunan, bidang pelayanan modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal sektor pembangunan, bidang pelayanan modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal sektor pembangunan dan lingkungan hidup, bidang pelayanan modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

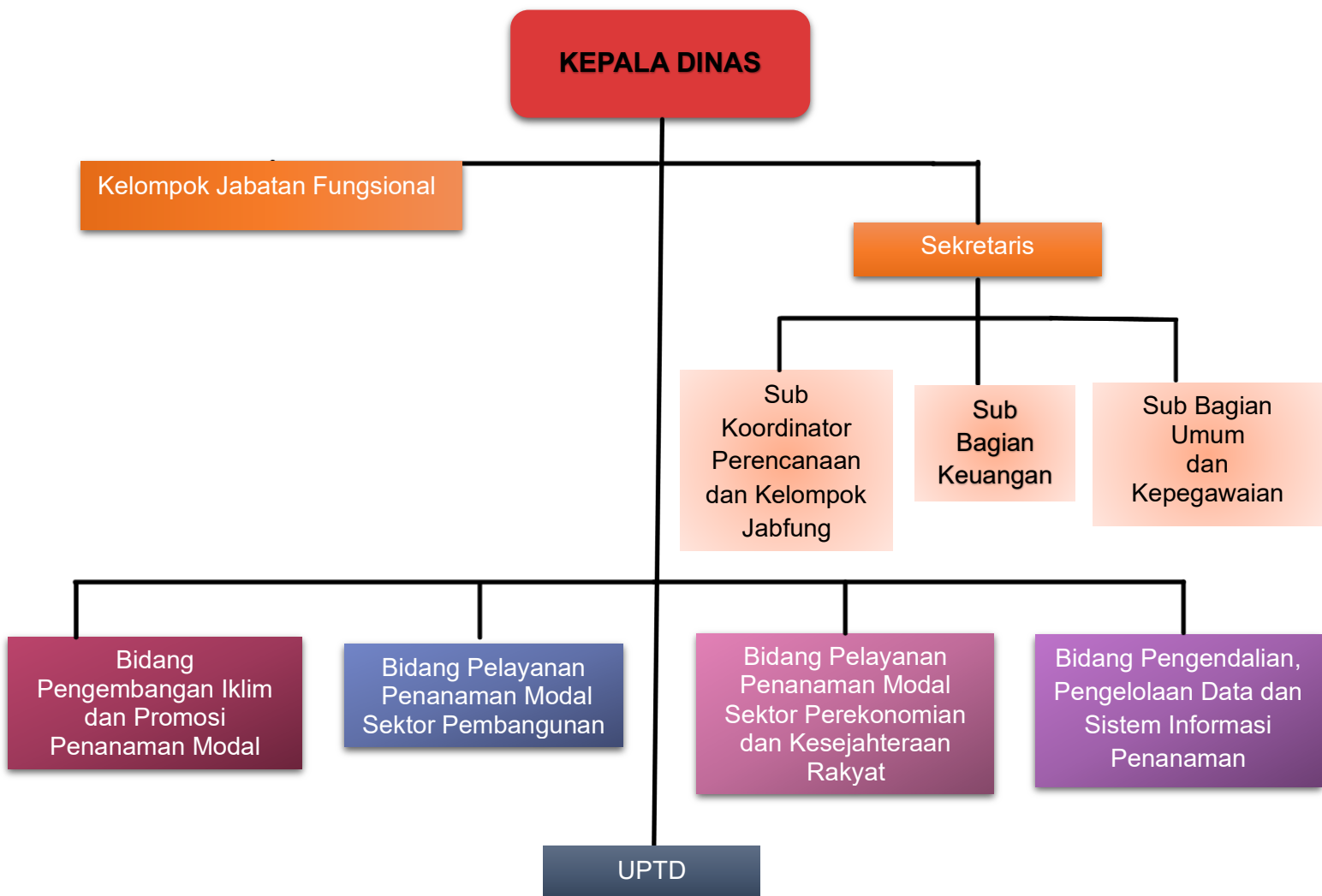
### **C. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Koordinator Perencanaan

3. Bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
4. Bidang pelayanan penanaman modal sektor pembangunan;
5. Bidang pelayanan penanaman modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
6. Bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
7. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1  
Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor 93 Tahun 2021  
Tentang  
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Banyumas



#### D. Sumber Daya Aparatur

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1  
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
<b>ASN</b>				
Golongan I	3	-	3	2.88
Golongan II	1	2	3	2.88
Golongan III	4	11	15	14.42
Golongan IV	8	3	11	10.58
<b>PPPK</b>	42	30	72	69
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

Sumber: DPMPTSP 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2  
ASN berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
<b>SD</b>	3	-	3	4.92
<b>SMP</b>	2	-	2	3.28
<b>SMA</b>	7	5	12	19.67
<b>D-I</b>	-	-	0	0
<b>D-II</b>	-	-	0	0
<b>D-III</b>	6	4	10	16.39
<b>S-1</b>	13	15	28	45.90
<b>S-2</b>	5	1	6	9.84
<b>S-3</b>	-	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Sumber: DPMPTSP 2025

Untuk tenaga penunjang yaitu tenaga Non ASN pada DPMPTSP Kab. Banyumas sejumlah 3 orang.

### **E. Isu Strategis**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

#### **1. Masalah Pokok**

- Belum optimalnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal
- Belum optimalnya peningkatan Investasi Daerah

#### **2. Masalah**

- Belum optimalnya Pelayanan Penanaman Modal
- Perumbuhan Nilai Investasi Daerah melambat

#### **3. Akar Masalah**

- Ketepatan waktu penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- Kegiatan Usaha yang memenuhi Kriteria belum memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha
- Belum optimalnya pengendalian terhadap realisasi Penanaman Modal
- Belum optimalnya Pengelolaan Data Perizinan Berusaha Dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- Promosi Investasi yang belum maksimal

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
- ❖ Peningkatan Investasi Daerah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah: BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yaitu:

- Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM: Fokus pada pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan manusia unggul
- Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah: Mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan industri kreatif
- Peningkatan Ketahanan Pangan: Memperkuat sektor pertanian dan kemandirian pangan local
- Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan berdaya saing (melalui komitmen Satria).

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

Terkait tugas fungsi DPMPTSP kab. Banyumas yaitu menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka akan mendukung sasaran pokok 3 dan 5. Untuk sasaran pokok 3 yaitu transformasi tata kelola pemerintahan yaitu pelayanan publik pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan MPP (Mal Pelayanan Publik). Untuk sasaran pokok 5 yaitu meningkatnya efektivitas penanganan kemiskinan dan pengangguran secara keseluruhan yaitu dengan menumbuhkan tenaga kerja yang terserap pada investasi baru ataupun yang berkembang.

DPMPTSP Kabupaten Banyumas Memiliki 4 Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyumas

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90.75	Tujuan
2	Mengoptimalkan sistem Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	98	Sasaran
3	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	Nilai Investasi Daerah	2800 Milyar	Tujuan
4	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	97	Sasaran

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2025

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis tahunan yang mengacu dari RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026 Peralihan, Serta Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 Peralihan. Indikator kinerja dan target yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025. Indikator kinerja utama akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91,72	Formulasi: IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perhitungan: progres positif Sumber Data: Laporan SKM
2	Mengoptimalkan sistem Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	99,83%	Formulasi: Jumlah Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan Perizinan Terpadu Satu Pintu x 100% Perhitungan: progres positif

				Sumber Data: Laporan Realisasi Perizinan
3	Meningkatnya nilai investasi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	Nilai Investasi Daerah	1.694 Milyar	Formulasi: Jumlah nilai Realisasi LKPM ditambah nilai realisasi investasi UMK Perhitungan: progres positif Sumber Data: Dokumen LKPM dan SIMIKE
4	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	93,75%	Formulasi: Jumlah kegiatan usaha yang terealisasi investasinya dibagi jumlah kegiatan berijin dikali seratus persen Perhitungan: progres positif Sumber Data: Realisasi Perizinan dan Realisasi Investasi (LKPM dan SIMIKE)

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPSTSP Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdiri dari 2 Tujuan, 2 sasaran, serta 3 sasaran tambahan berdasarkan arahan dari Kemenpan RB. 3 Sasaran terakhir tidak masuk dalam cascading kinerja, tetapi sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja.

### C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp 9.882.647.332. Adapun belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program dan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	293.717.500
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	95.807.800
3	Program Promosi Penanaman Modal	192.529.000
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	128.739.400

5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8.825.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.163.028.632
<b>Jumlah</b>		<b>9.882.647.332</b>

*Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas 2025*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 Peralihan.

Sesuai dengan pedoman Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja ini disajikan dalam uraian hasil pengukuran, analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan dari hasil pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2025 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja tersebut berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut

selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2025 yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 Peralihan. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan peringkat kinerja sebagai berikut:

Hingga akhir Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran, 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, diperoleh rata-rata capaian kinerja sampai dengan bulan Desember Tahun 2025. Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai 109,37% yang dihitung dari 2 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran. Adapun capaian tujuan sebesar 102,34%, capaian sasaran sebesar 112,19%, capaian kinerja program sebesar 104,56%, capaian kinerja kegiatan sebesar 92,52%, dan capaian kinerja sub kegiatan sebesar 108,27%. Sementara itu, persentase realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 93.89%. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori Tercapai. Adapun Capaian kinerja berdasarkan indicator kinerja utama antara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas**

Tujuan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
<b><i>Tujuan 1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal</i></b>					
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	91.72	92.44	100.78	Tercapai
<b><i>Tujuan 2 Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan</i></b>					
Nilai Investasi Daerah	Milyar	1.694	3267.379	192.87	Tercapai

<b>Rata-rata capaian</b>				<b>146.83%</b>	
<b>Sasaran 1 Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal</b>					
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	99.83	100	100.17	Tercapai
<b>Sasaran 2 Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya</b>					
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	93.75	111.59	119.03	Tercapai
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>109.60%</b>	

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

## B. Analisis Capaian Kinerja

### 1. Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

#### a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	91.72	92.44	100.78

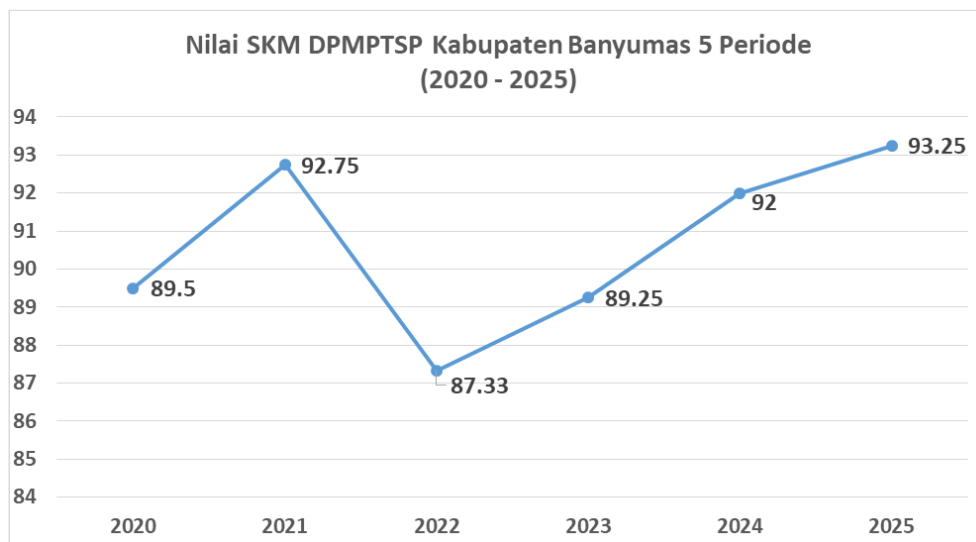
Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan target Renja/RKPD sebesar 91,72 dan realisasi sebesar 92,44 sehingga tingkat capaian mencapai 100,784 persen. Capaian tersebut diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara bulanan, dengan nilai SKM Januari sebesar 93,75; Februari 92,75; Maret 94,75; April 92,50; Mei 89,75; Juni 86,75; Juli 94,97; Agustus 91,81; September 91,75; Oktober 92,50; November 94,75; dan Desember 93,25. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian IKM

Tahun 2024 tercatat sebesar 100,784 persen, sehingga indikator kinerja dinyatakan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan diampu oleh Bidang Daldatin.

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025



Perkembangan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kabupaten Banyumas selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika capaian kinerja yang berfluktuasi namun cenderung meningkat pada periode akhir. Nilai SKM pada tahun 2020 tercatat sebesar 89,50 dan meningkat menjadi 92,75 pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai 87,33. Penurunan tersebut selanjutnya diikuti dengan peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 89,25 dan terus membaik pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 92,00. Pada tahun 2025, nilai SKM kembali meningkat menjadi 93,25 yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Tren peningkatan pada tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan kinerja pelayanan DPMPTSP secara berkelanjutan serta efektivitas upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan.

**b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun sebelumnya**

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tiga tahun sebelumnya disajikan untuk menggambarkan perkembangan kinerja dari waktu ke waktu serta tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tiga tahun sebelumnya pada tabel berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022–2025  
Indikator Kinerja IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Tahun 2022</b>				
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	89	87.33	98.12
<b>Tahun 2023</b>				
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	90	89.25	99.17
<b>Tahun 2024</b>				
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	91.3	91.72	100.46
<b>Tahun 2025</b>				
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	91.72	92.44	100.78

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan peningkatan yang konsisten pada periode 2022–2025, dari 98,12 persen pada tahun 2022 menjadi 99,17 persen pada tahun 2023, serta melampaui target pada tahun 2024 dan 2025 dengan capaian masing-masing sebesar 100,46 persen dan 100,784 persen, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal secara berkelanjutan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Pada indikator kinerja ini menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra sebagai dasar penilaian tingkat ketercapaian sasaran strategis.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2025 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	91.72	92.44	100.78	101.58	101.58

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target akhir Renstra. Realisasi sebesar 92,44 telah mencapai 100,784 persen dari target tahunan dan 101,58 persen terhadap target Renstra, yang mencerminkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)**

Untuk dasar evaluasi kinerja, realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb dalam rangka pencapaian Tujuan 1 yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.5  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan  
Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah  
Barlingmascakeb

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.78	NA	NA	NA	NA

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum dapat dilakukan dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maupun Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb karena keterbatasan ketersediaan data pembanding. Meskipun demikian, realisasi capaian sebesar 100,784 persen menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik serta mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan**

Secara umum, pencapaian target kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja yang mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, optimalisasi pemanfaatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik, serta komitmen Perangkat Daerah dalam mempercepat proses pelayanan dan realisasi investasi.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja serta solusi yang telah dilakukan akan dijelaskan pada uraian berikut:

- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan didukung oleh kualitas perencanaan yang baik, sehingga mampu

meningkatkan kepuasan masyarakat serta investor atau pelaku usaha yang mengajukan perizinan. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap terjaganya bahkan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- Dalam pencapaian target kinerja pada indikator ini tidak ditemukan kendala atau hambatan yang signifikan, sehingga tidak diperlukan solusi atau tindakan korektif khusus. Faktor-faktor keberhasilan pencapaian kinerja telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Selama Tahun 2025 DPMPTSP Kab. Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPMPTSP Kab, Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kab. Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan antara lain:

Tabel 3.6

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja tujuan IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan
1	<b>[3] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100	91.02
	[4] Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	45946	91.02
	[5] Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3428	41.30
	[5] Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24562	95.42
	[5] Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	122	81.41

[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0
---	---	---	---

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun pelaporan secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai waktu yang ditetapkan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91,02%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terealisasi sebanyak 45.946 layanan serta pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik kepada 24.562 pelaku usaha dengan realisasi keuangan mencapai 95,42%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum optimal, antara lain penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan realisasi keuangan sebesar 41,30%, serta kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang belum terealisasi. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya agar dapat lebih mendukung peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.

## **2. Tujuan 2: Meningkatnya Investasi yang berkualitas dan berkelanjutan**

### **a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Nilai Investasi Daerah Tahun 2025 ditampilkan tabel berikut:

Tabel 3.7  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Investasi Daerah	Milyar	1.694	3267.379	192.87

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Tahun 2025, target Nilai Investasi Daerah ditetapkan sebesar 1.694 milyar dan direalisasikan sebesar 3.267,379 milyar sehingga capaian kinerja mencapai 192,879 persen. Capaian tersebut diukur berdasarkan jumlah nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang meliputi LKPM skala Non UMK, LKPM skala UMK, serta realisasi investasi Non LKPM skala Mikro. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, target kinerja dinyatakan telah tercapai, dengan pelaksanaan dan pengendalian indikator diampu oleh Kepala Dinas dan Sekretaris sebagai pengendali serta didukung oleh Bidang Data, Pengolahan, dan Informasi (Daldatin).

**b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun sebelumnya**

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tiga tahun sebelumnya disajikan untuk menggambarkan perkembangan kinerja dari waktu ke waktu serta tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tiga tahun sebelumnya pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022–2025  
Indikator Kinerja Nilai Investasi Daerah Tahun 2025

Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Tahun 2022</b>				
Nilai Investasi Daerah	Milyar	600	1.662.46	277.08

<b>Tahun 2023</b>				
Nilai Investasi Daerah	Milyar	600	1.993.59	332.27
<b>Tahun 2024</b>				
Nilai Investasi Daerah	Milyar	1400	2.423.11	173.07
<b>Tahun 2025</b>				
Nilai Investasi Daerah	Milyar	1.694	3267.379	192.87

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja Nilai Investasi Daerah pada periode 2022–2025 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Meskipun target investasi mengalami peningkatan, realisasi tetap menunjukkan kinerja yang tinggi, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 dan tetap berada di atas 100 persen hingga Tahun 2025. Hal ini mencerminkan terjaganya kinerja realisasi investasi Daerah secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data perbandingan capaian kinerja Nilai Investasi Daerah pada periode Tahun 2022–2025 yang menggambarkan perkembangan realisasi investasi dari tahun ke tahun serta tingkat pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9  
**Realisasi Investasi Tahun 2022**

NO	SEKTOR	LKPM NON UMK		LKPM UMK	NON LKPM / MIKRO	JUMLAH
		PMA	PMDN	PMDN	PMDN	
1	SEKTOR PRIMER	-	868.300.000	70.000.000	30.244.785.000	31.183.085.000
2	SEKTOR SEKUNDER	47.354.994	235.296.900.000	9.955.481.000	115.194.199.145	360.493.935.139
3	SEKTOR TERSIER	11.405.378.477	623.790.800.000	46.296.069.959	564.625.144.927	1.246.117.393.363
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>11.452.733.472</b>	<b>859.956.000.000</b>	<b>56.321.550.959</b>	<b>710.064.129.072</b>	<b>1.637.794.413.503</b>

Sumber: LKPM Kabupaten Banyumas, 2022

Tabel 3.10

**Realisasi Investasi Tahun 2023**

NO	SEKTOR	LKPM NON UMK		LKPM UMK	NON LKPM / MIKRO	JUMLAH
		PMA	PMDN	PMDN	PMDN	
1	SEKTOR PRIMER	-	2.062.200.000	1.600.000.000	28.788.450.000	32.450.650.000,00
2	SEKTOR SEKUNDER	121.173.405.028,91	93.695.600.000	13.466.749.470	132.383.427.333	360.719.181.831,91
3	SEKTOR TERSIER	19.364.298.952,73	998.625.900.000	46.692.472.214	535.739.620.180	1.600.422.291.346,73
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>140.537.703.981,64</b>	<b>1.094.383.700.000</b>	<b>61.759.221.684</b>	<b>696.911.497.513</b>	<b>1.993.592.123.178,64</b>

Sumber: LKPM Kabupaten Banyumas, 2023

Tabel 3.11

**Realisasi Investasi Tahun 2024**

TARGET	PERIODE	SKALA NON UMK		UMK	Non LKPM	JUMLAH
		PMA	PMDN			
1.800. Milyar	TW I	520.500.000	230.405.100.000	55.576.332.310	274.401.252.946	505.326.852.946
	TW II	32.046.010.000	483.984.500.000		225.075.397.870	796.682.240.180
	TW III	17.626.490.000	178.077.400.000	44.156.251.636	268.795.771.461	464.499.661.461
	TW IV	5.272.710.431	306.153.296.815		301.015.071.131	656.597.330.013
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>55.465.710.431</b>	<b>1.198.620.296.815</b>	<b>99.732.583.946</b>	<b>1.069.287.493.408</b>	<b>2.423.106.084.600</b>

Sumber: LKPM Kabupaten Banyumas, 2024

Tabel 3.12

**Realisasi Investasi Tahun 2025**

NO	SEKTOR	LKPM NON UMK		LKPM UMK	NON LKPM / MIKRO	JUMLAH
		PMA	PMDN	PMDN	PMDN	
1	SEKTOR PRIMER	-	2.342.061.989,00	3.571.470.000	15.651.678.583	21.565.210.572,00
2	SEKTOR SEKUNDER	417.426.058,00	2.443.422.929,00	2.229.841.997	35.167.683.352	40.258.374.336,00
3	SEKTOR TERSIER	37.356.980.983,00	218.305.112.198,00	23.529.369.500	429.495.803.379	708.687.266.060,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>37.774.407.041,00</b>	<b>223.090.597.116,00</b>	<b>29.330.681.497</b>	<b>480.315.165.314</b>	<b>770.510.850.968,00</b>

Sumber: LKPM Kabupaten Banyumas, 2025

## Statistik Capaian Investasi Triwulan IV Tahun 2025



Sumber: LKPM Kabupaten Banyumas, 2025



Sumber: LKPM Kabupaten Banyumas, 2025

Realisasi investasi daerah pada periode Tahun 2022–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Pada Tahun 2022, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp1,64 triliun, yang bersumber dari LKPM Non UMK, LKPM UMK, dan investasi Non LKPM/mikro. Selanjutnya pada Tahun 2023, realisasi investasi meningkat menjadi Rp1,99 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor tersier dan LKPM skala UMK.

Pada Tahun 2024, realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp 2,42 triliun, meskipun target investasi ditetapkan lebih tinggi, dengan

kontribusi dominan berasal dari PMDN Non UMK dan investasi Non LKPM. Peningkatan kinerja tersebut berlanjut pada Tahun 2025, dengan total realisasi investasi mencapai Rp 3,27 triliun, yang didorong oleh kontribusi sektor tersier serta realisasi LKPM UMK dan Non LKPM/mikro. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi daerah selama empat tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang konsisten dan mencerminkan terjaganya iklim investasi Daerah.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Pada indikator kinerja ini menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra sebagai dasar penilaian tingkat ketercapaian sasaran strategis.

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Investasi Daerah Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2025 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai Investasi Daerah	Milyar	1.694	3267.379	192.87	136.14	136.14

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan capaian kinerja Nilai Investasi Daerah dengan target akhir Renstra menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)**

Untuk dasar evaluasi kinerja, realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb dalam rangka pencapaian Meningkatnya Investasi yang

berkualitas dan berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Nilai Investasi Daerah.

Tabel 3.14

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Nilai Investasi Daerah	3267.379 Milyar	1.905.6 Milyar	88.50 Milyar	448.58 Milyar	510.58 Milyar

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Realisasi Nilai Investasi Daerah Tahun 2025 Kabupaten Banyumas sebesar Rp 3.267.379 Milyar menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, serta kabupaten sekitar di wilayah Barlingmascakeb. Kondisi ini mencerminkan kinerja Penanaman Modal Daerah yang relatif baik, sekaligus menjadi indikator positif dalam mendukung pencapaian Nilai Investasi Daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang dilakukan**

Target kinerja tujuan dapat tercapai karena meningkatnya kualitas investasi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal tersebut didukung melalui pengembangan iklim penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal, serta pengendalian penanaman modal yang secara nyata menghasilkan peningkatan nilai investasi. Upaya awal berupa penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelaksanaan promosi investasi telah mendorong minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Banyumas.

Meskipun demikian, masih diperlukan sejumlah perbaikan, antara lain penyempurnaan strategi dan kualitas promosi investasi, peningkatan

pelayanan pemberian insentif dan kemudahan berusaha, pemutakhiran peta potensi unggulan daerah berbasis IPRO, serta penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). Selain itu, perbaikan juga diarahkan pada penyelesaian permasalahan realisasi investasi melalui peningkatan ketepatan identifikasi dan telaahan permasalahan.

Dari sisi teknis pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Pengawasan penanaman modal juga terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen dan ketentuan yang berlaku, sehingga investasi yang terealisasi benar-benar berkualitas dan berkelanjutan.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Selama Tahun 2025 DPMPTSP Kab. Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPMPTSP Kab, Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kab. Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Nilai Investasi Daerah antara lain:

Tabel 3.15

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja tujuan Nilai Investasi Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan
2	<b>[3] PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	100	98.98
	[4] Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas insentif PM	2	97.49
	[5] Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	2	97.49
	[4] Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dalam peta potensi yang telah dikaji	1	99.98
	[5] Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	99.96
	[5] Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	99.98

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan berupa Nilai Investasi Daerah. Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja pada tingkat program mencapai 100%, dengan realisasi

keuangan sebesar 98,98%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan hampir seluruh anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan utama, antara lain penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, fasilitasi kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM, serta penyusunan dan pengembangan peta potensi investasi daerah. Sebagian besar kegiatan menunjukkan capaian kinerja sesuai target dengan realisasi keuangan yang tinggi (di atas 97%). Namun demikian, pada kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), indikator jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan belum terealisasi pada tahun berjalan, meskipun dukungan anggaran telah terserap hampir seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses regulasi masih memerlukan tahapan lanjutan dalam penyelesaiannya.

### 3. Sasaran 1: Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal

#### a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 ditampilkan tabel berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	99.83	100	100.17

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Tahun 2025, target Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan ditetapkan sebesar 99,83 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100,17 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerbitan perizinan telah melampaui target yang ditetapkan.

**b. Perbandingan antara Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022–2025 Indikator Kinerja Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022–2025  
Indikator Kinerja Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu  
yang diterbitkan

Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Tahun 2022</b>				
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	NA	NA	NA
<b>Tahun 2023</b>				
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	NA	NA	NA
<b>Tahun 2024</b>				
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	96	100,18	104,35
<b>Tahun 2025</b>				
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	99.83	100	100.17

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pengukuran capaian kinerja Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan mulai dilakukan pada Tahun 2024, sedangkan data Tahun 2022 dan 2023 tercatat NA karena indikator belum ditetapkan dan/atau belum dilakukan pengukuran pada periode tersebut; pada Tahun

2024 dan 2025 capaian kinerja masing-masing mencapai 104,35 persen dan 100,17 persen sehingga melampaui target yang ditetapkan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra pada indicator kinerja ini disajikan untuk menilai tingkat ketercapaian optimalisasi sistem Pelayanan Penanaman Modal.

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang diterbitkan dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2025 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	%	99.83	100	100.17	103.09	103.09

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra, mencerminkan efektivitas sistem pelayanan perizinan yang diterapkan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)**

Untuk dasar evaluasi kinerja, realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb dalam rangka pencapaian Meningkatnya Investasi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Nilai Investasi Daerah.

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan	100.17	NA	NA	NA	NA

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan belum dapat dilakukan secara komparatif dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maupun Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb karena keterbatasan ketersediaan data pembandingan. Namun demikian, realisasi capaian sebesar 100,17 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu telah melampaui target yang ditetapkan dan menjadi dasar evaluasi dalam upaya optimalisasi Sistem Pelayanan Penanaman Modal.

**e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan**

Target kinerja Tujuan dan sasaran dapat tercapai dikarenakan optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu dengan pelayanan yang optimal telah menghasilkan jumlah sk yang banyak serta persentase perizinan satu pintu yang diterbitkan dapat terjaga dan meningkat. Bahwa dalam pencapaian target tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada solusi yang dilakukan, faktor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Selama Tahun 2025 DPMPTSP Kab. Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPMPTSP Kab, Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik

kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kab. Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan antara lain:

Tabel 3.20

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan
1	[3] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100	91.02

[4] Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sektor perekonomian kesra dan sektor Pembangunan	45946	91.02
[5] Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3428	41.30
[5] Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24562	95.42
[5] Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	122	81.41
[5] Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran berupa Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan. Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja pada tingkat program mencapai 100%, dengan realisasi keuangan sebesar 91,02%. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu telah berjalan sesuai target yang ditetapkan, meskipun penyerapan anggaran belum sepenuhnya maksimal.

Pada tingkat kegiatan, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu menghasilkan 45.946 perizinan, yang menunjukkan tingginya aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik juga menunjukkan capaian yang baik dengan jumlah layanan kepada 24.562 pelaku usaha dan realisasi keuangan sebesar 95,42%.

Namun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko yang realisasi keuangannya baru mencapai 41,30%, serta kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang belum terealisasi pada tahun berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam peningkatan layanan konsultasi serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

#### 4. Sasaran 2: Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya

##### a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya Tahun 2025 ditampilkan tabel berikut:

Tabel 3.21

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	93.75	111.59	119.03

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Tahun 2025, target Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya ditetapkan sebesar 93,75 persen dan terealisasi sebesar 111,59 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 119,03 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

**b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022–2025 Indikator Kinerja Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.22  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022–2025  
Indikator Kinerja Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya

Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Tahun 2022</b>				
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	NA	NA	NA
<b>Tahun 2023</b>				
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	NA	NA	NA
<b>Tahun 2024</b>				
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	76	107	141,26
<b>Tahun 2025</b>				
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	93.75	111.59	119.03

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, indikator Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan belum ditetapkan target dan realisasinya (NA), seiring dengan proses penyesuaian kebijakan, sistem perizinan berbasis risiko, serta penyelarasan indikator kinerja dengan regulasi dan mekanisme pelaporan yang berlaku pada periode tersebut. Penetapan indikator secara kuantitatif baru dilakukan setelah sistem dan basis data perizinan dinilai siap untuk diukur secara konsisten.

Pada Tahun 2024, indikator mulai ditetapkan dengan target sebesar 76%, dan terealisasi 107%, sehingga capaian kinerja mencapai 141,26%, yang menunjukkan kinerja pelayanan perizinan melampaui target yang ditetapkan. Tren positif tersebut berlanjut pada Tahun 2025 dengan target 93,75% dan realisasi 111,59%, sehingga capaian kinerja mencapai 119,03%, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas dan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan ini menyajikan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra pada indikator kinerja ini disajikan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan usaha dalam merealisasikan investasi yang telah direncanakan atau difasilitasi.

Tabel 3.23

Perbandingan Capaian Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya Tahun 2025 yang diterbitkan dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2025 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	93.75	111.59	119.03	143.06	143.06

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Tahun 2025, Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya mencapai 111,59% dari target 93,75%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 119,03%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja indikator telah melampaui target akhir Renstra dengan persentase kinerja sebesar 143,06%.

**d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb disajikan untuk menggambarkan capaian pada Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya.

Tabel 3.24

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, Provinsi, serta Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	119.03	NA	NA	NA	NA

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya belum dapat dilakukan secara komparatif dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maupun Kabupaten sekitar di Wilayah Barlingmascakeb karena keterbatasan ketersediaan data pembanding. Namun demikian, realisasi capaian sebesar 119,03 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha yang terealisasi investasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas upaya mendorong realisasi Investasi di Daerah.

**e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan**

Target kinerja Tujuan dan sasaran dapat tercapai dikarenakan meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya, yaitu dengan upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, serta peningkatan kepatuhan pelaporan investasi, serta Bimtek dan Pengawasan Penanaman Modal terhadap kegiatan usaha yang telah berijin supaya dapat melaporkan kegiatan usahanya ke dalam aplikasi OSS RBA yaitu LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Dalam pencapaian sasaran ini tidak terdapat kendala atau hambatan yang signifikan, sehingga tidak diperlukan langkah perbaikan khusus.

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Selama Tahun 2025 DPMPTSP Kab. Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPMPTSP Kab, Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kab. Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan antara lain:

Tabel 3.25

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator kinerja Sasaran Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya

No	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Keuangan
1	<b>[3] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase realisasi investasi	192.87	78.97
	[4] Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan Kegiatan usaha yang memperoleh fasilitasi penyelesaian masalah pembinaan dan pengawasan	537	78.97
	[5] Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14	64.46
	[5] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	487	82.45

	[5] Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36	83.62
2	<b>[3] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	100	94.05
	[4] Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disajikan di website	4	94.05
	[5] Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan	4	94.05

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya didukung oleh dua program utama, yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Berdasarkan tabel di atas, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan persentase realisasi investasi mencapai 192,879% dari target yang ditetapkan, meskipun realisasi keuangan baru mencapai 78,97%. Hal ini menunjukkan bahwa target investasi daerah dapat terlampaui dengan dukungan kegiatan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi kepada pelaku usaha.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, serta kegiatan pengawasan penanaman modal. Melalui kegiatan tersebut, sebanyak 537 pelaku usaha dan kegiatan usaha memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengawasan. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh 487 pelaku usaha, yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap implementasi perizinan berusaha berbasis risiko serta kepatuhan dalam pelaksanaan investasi. Sementara itu, kegiatan pengawasan penanaman modal juga telah dilakukan melalui analisis, verifikasi data, serta inspeksi lapangan terhadap 36 kegiatan usaha.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal juga berperan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui penyediaan data dan informasi investasi yang terbaru secara periodik. Program ini mencapai capaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,05%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi perizinan serta investasi telah berjalan dengan baik. Ketersediaan data yang terintegrasi secara elektronik menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses pemantauan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan terkait pengembangan investasi daerah.

### **C. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran merupakan gambaran tingkat penyerapan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja Perangkat Daerah selama tahun anggaran berjalan. Berikut disajikan realisasi anggaran program dan kegiatan dalam tabel sebagai bahan evaluasi dan analisis lebih lanjut.

Tabel 3.26

## Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Program	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>[3] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	[1] Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	293.717.500	267.345.964	91.02
		[2] Mengoptimalkan sistem pelayanan penanaman modal	293.717.500	267.345.964	91.02
		Persentase Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	293.717.500	267.345.964	91.02
		[1] Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	9.588.930.232	9.011.700.970	93.98
		[2] Meningkatkan kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	9.588.930.232	9.011.700.970	93.98
2	<b>[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	9.163.028.632	8.615.478.584	94.02
3	<b>[3] PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal	95.807.800	94.826.980	98.98
4	<b>3] PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya promosi investasi	192.529.000	191.423.922	99.43

No	Tujuan/Sasaran/Program	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
5	[3] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengendalian terhadap realisasi Penanaman Modal	128.739.400	101.671.484	78.97
6	[3] PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengelolaan data perizinan berusaha dan LKPM	8.825.000	8.300.000	94.05
<b>Jumlah</b>			<b>9.882.647.332</b>	<b>9.279.046.934</b>	<b>93.89</b>

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, secara umum capaian kinerja program berada pada kategori sangat baik, dengan tingkat realisasi total sebesar 93,89% dari pagu anggaran Rp9.882.647.332 yang terealisasi sebesar Rp9.279.046.934.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui *Program Pelayanan Penanaman Modal* menunjukkan tingkat capaian sebesar 91,02%, yang mencerminkan optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai standar waktu yang ditetapkan. Sementara itu, pada aspek peningkatan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, realisasi mencapai 93,98%, yang menunjukkan efektivitas dukungan terhadap kegiatan usaha yang terealisasi investasinya.

Program dengan capaian tertinggi terdapat pada *Program Promosi Penanaman Modal* sebesar 99,43%, diikuti *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal* sebesar 98,98%, yang mengindikasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberian insentif berjalan hampir optimal sesuai perencanaan. Adapun *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* juga menunjukkan kinerja baik dengan realisasi 94,02%, mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.

Namun demikian, *Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal* mencatat capaian terendah sebesar 78,97%, yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan fungsi monitoring dan pengawasan realisasi

investasi. Sedangkan *Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* mencapai 94,05%, menunjukkan komitmen dalam peningkatan kualitas data perizinan dan pelaporan LKPM.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran yang tinggi dan relatif merata pada sebagian besar program menunjukkan perencanaan yang efektif serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### D. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

Tabel3.27

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Presentasi rata-rata capaian kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1	100.78	267.345.964	91.02
2	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1	192.87	9.011.700.970	93.98
3	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal	1	100.17	267.345.964	91.02
4	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	1	119.03	9.011.700.970	93.98

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

#### Penjelasan:

Berdasarkan tabel efektivitas anggaran terhadap capaian indikator kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian kinerja pada seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target

kinerja (di atas 100%), dengan realisasi anggaran yang relatif tinggi namun masih berada di bawah pagu anggaran yang tersedia.

Pada tujuan Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal, capaian kinerja mencapai 100,784% dengan realisasi anggaran sebesar Rp267.345.964 atau 91,02%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dapat dicapai secara efektif dengan pemanfaatan anggaran yang efisien. Kondisi serupa juga terlihat pada sasaran Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal yang memiliki capaian kinerja 100,17% dengan tingkat realisasi anggaran yang sama, yaitu 91,02%.

Sementara itu, pada tujuan Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, capaian kinerja mencapai 192,879% dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.011.700.970 atau 93,98%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan dan pengendalian penanaman modal mampu memberikan hasil yang sangat baik dengan dukungan penyerapan anggaran yang optimal. Demikian pula pada sasaran Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya, capaian kinerja mencapai 119,03% dengan tingkat realisasi anggaran yang sama, yaitu 93,98%.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 3.28  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Presentasi rata-rata capaian kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5 (apabila kolom 4 tercapai $\geq 100\%$ )

1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1	100.78	91.02	9.67
2	Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1	192.87	93.98	98.89
3	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal	1	100.17	91.02	9.15
4	Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	1	110.03	93.98	16.05

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

### Penjelasan:

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja pada seluruh tujuan dan sasaran strategis yang melampaui target ( $\geq 100\%$ ), sementara realisasi anggaran berada di bawah 100%. Dengan demikian, terdapat selisih positif antara capaian kinerja dan realisasi anggaran yang mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tujuan Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanaman Modal, rata-rata capaian kinerja mencapai 100,784% dengan realisasi anggaran 91,02%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,84%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Selanjutnya pada tujuan Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, capaian kinerja mencapai 192,879% dengan realisasi anggaran 93,98%, sehingga tingkat efisiensi tercatat sebesar 22,71%. Nilai efisiensi ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan kinerja yang jauh melampaui target dengan dukungan anggaran yang masih dalam batas optimal.

Pada sasaran Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Penanaman Modal, capaian kinerja sebesar 100,17% dengan realisasi anggaran 91,02%, sehingga

tingkat efisiensi mencapai 11,02%. Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya kegiatan usaha yang terealisasi investasinya, capaian kinerja mencapai 119,03% dengan realisasi anggaran 93,98%, sehingga tingkat efisiensi tercatat sebesar 21,06%.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien, dimana capaian kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang optimal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah telah dilaksanakan secara baik.

- **Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa**

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pada tahun 2025 DPMPTSP telah melaksanakan sebanyak 112 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 3.953.930.000,- realisasi pengadaan sebesar Rp 3.731.359.798,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 222.570.211,- atau 5,6%.

#### **E. Prestasi dan Penghargaan**

Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP Kab. Banyumas pada Tahun 2024 adalah Piagam Penghargaan Bupati Banyumas No. S/230/000.8.3.4/VII/2025 atas Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada Penilaian PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 kategori Sekretariat/Inspektorat/Dinas/Badan/Rumah Sakit/Klinik, Peringkat Kedua dengan Nilai 4.38.

#### **F. Inovasi**

##### **a) LAKONNE TERPANA (Layanan Konsultasi Secara Online dengan Media Zoom Meeting tentang Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan)**

*Latar Belakang:*

Dibutuhkan media konsultasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dan pendampingan terkait perizinan dan non-perizinan.

*Manfaat:*

Memberikan kemudahan akses konsultasi secara daring kepada pelaku usaha melalui media Zoom Meeting yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

**b) PENJOL PEDAS (Pendampingan Perizinan Online Penyandang Disabilitas)**

*Latar Belakang:*

Dibutuhkan layanan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas dalam proses pengajuan perizinan secara online agar mereka dapat mengakses layanan secara setara.

*Manfaat:*

Memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan pendaftaran perizinan online melalui pendampingan yang disediakan oleh petugas pelayanan.

**c) MPP Keliling (Mal Pelayanan Publik Keliling)**

*Latar Belakang:*

Dibutuhkan sarana pelayanan keliling yang dapat menjangkau masyarakat di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat layanan atau memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan perizinan.

*Manfaat:*

Memper memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non-perizinan melalui pelayanan yang mendekat langsung ke wilayah kecamatan atau lokasi yang membutuhkan.

**d) GELAS UMIKECEMAS (Gerakan Legalisasi Usaha Mikro Kecil Banyumas)**

*Latar Belakang:*

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau.

*Manfaat:*

Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non-perizinan melalui pelayanan yang mendekat langsung ke wilayah kecamatan atau lokasi yang membutuhkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Tahun 2025, secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada dalam kategori **tercapai**.

Capaian terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran utama, serta 3 (tiga) sasaran tambahan menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal. Rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai 110,73%, capaian sasaran utama sebesar 113,68%, capaian program sebesar 155,22%, capaian kegiatan sebesar 126,12%, serta capaian sub kegiatan sebesar 205,78%, dengan realisasi keuangan mencapai 96,26% sampai dengan 31 Desember 2025.

Secara substantif, keberhasilan tersebut tercermin pada indikator-indikator strategis sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Target sebesar 91,72 terealisasi sebesar 92,44 dengan capaian 100,784%, serta telah melampaui target akhir Renstra. Tren SKM selama periode 2020–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten pada tiga tahun terakhir, yang mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
2. Persentase Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterbitkan Target 99,83% terealisasi 100% dengan capaian 100,17%, serta telah melampaui target akhir Renstra.
3. Nilai Investasi Daerah Target sebesar Rp1,694 triliun terealisasi Rp3,267 triliun dengan capaian 192,879%. Realisasi investasi Tahun 2025 juga menunjukkan pertumbuhan konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan terjaganya iklim investasi daerah.

4. Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya Target 93,75% terealisasi 111,59% dengan capaian 119,03% dan telah melampaui target akhir Renstra.

## **B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis**

Isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dirumuskan berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal. Progres penyelesaiannya pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

### **1. Belum optimalnya iklim dan kemudahan dalam berinvestasi**

Progres yang telah dilakukan:

- a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati terkait pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagai instrumen stimulus bagi investor, khususnya yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- b. Fasilitasi pengajuan insentif/kemudahan berusaha dengan realisasi 1 (satu) kegiatan usaha. Rendahnya capaian disebabkan masih terbatasnya minat pelaku usaha akibat persyaratan yang dinilai cukup ketat serta terdapat pengajuan yang belum memenuhi ketentuan dalam Perbup.
- c. Penyusunan Studi Kelayakan Peta Potensi Investasi Wisata Pemandian Alam Kedung Kampak Sela Negara, Sumpiuh, Banyumas.

Rencana tindak lanjut:

- a. Usulan revisi Perbup Insentif/Kemudahan Berusaha agar lebih adaptif dan memberikan kemudahan yang terukur bagi investor, disertai sosialisasi langsung kepada pelaku usaha potensial.
- b. Penyusunan SOP pemanfaatan peta potensi investasi dalam promosi melalui forum bisnis, one on one meeting, Central Java Investment Platform (CJIP), Sistem Galeri Informasi Banyumas (SIGAIB), serta pameran investasi seperti APKASI dan media promosi lainnya.
- c. Penetapan kebijakan turunan atas Naskah Akademik Strategi Promosi melalui Keputusan Kepala DPMPTSP dan SOP strategi promosi.
- d. Penyusunan draf Perbup RUPMK yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan Trilas Bupati Terpilih.

## **2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan**

Progres yang telah dilakukan:

- a. Pengembangan dan optimalisasi SIGAIB sebagai media promosi investasi.
- b. Pemanfaatan sistem OSS-RBA dan SIPANJIMAS dalam pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.
- c. Penambahan menu serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyajian informasi pada sistem layanan.

Rencana tindak lanjut:

Penyempurnaan SOP pelayanan perizinan, khususnya terkait waktu layanan dan simplifikasi prosedur, guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

## **3. Masih kurangnya kompetensi SDM pelayanan**

Progres yang telah dilakukan:

- a. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan instansi pusat/provinsi maupun melalui *In House Training* (IHT).
- b. Fasilitasi tenaga jasa pelayanan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Rencana tindak lanjut:

Penyusunan job description dan sasaran kinerja individu (SKI) secara lebih terstruktur agar pelaksanaan tugas lebih efektif, efisien, dan terukur.

## **4. Kurangnya muatan dalam Peta Potensi Investasi Kabupaten Banyumas**

Progres yang telah dilakukan:

- a. Kerja sama dengan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik
- b. Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal berbasis IPRO.
- c. Penyusunan Naskah Akademik Strategi Promosi.
- d. Penyusunan Naskah Akademik RUPMK.

Rencana tindak lanjut:

- a. Penyusunan kebijakan turunan berupa SK Kepala, SOP, maupun draf Perbup berdasarkan naskah akademik yang telah disusun.
- b. Pengembangan kajian potensi unggulan berbasis IPRO yang telah ditetapkan sebagai kebijakan potensi unggulan daerah.

## **5. Kurang optimalnya pengelolaan Data dan Informasi**

Progres yang telah dilakukan:

- a. Pengolahan dan pengelolaan data elektronik melalui OSS-RBA, LKPM, dan Survei Kepuasan Masyarakat (Susanmas).
- b. Pemanfaatan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi investasi.

Rencana tindak lanjut:

- a. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan data strategis.
- b. Penguatan sistem pengelolaan data agar lebih terintegrasi, akurat, dan mudah dianalisis sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

## **6. Belum terbentuknya Kawasan Industri**

Progres yang telah dilakukan:

- a. Partisipasi aktif DPMPTSP sebagai bagian dari tim pembentukan kawasan industri bersama Bappedalitbang, Aspem Perekonomian dan Kesra Setda Banyumas, Dinperindag, serta Dinas PU.
- b. Keterlibatan dalam pembahasan Raperda RTRW dan rencana pembentukan kawasan industri.

Rencana tindak lanjut:

Peningkatan koordinasi lintas PD dan pihak terkait untuk percepatan realisasi kawasan industri, guna mendukung peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Demikian LkjIP DPMPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan, saran, dan kritik konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan pada periode berikutnya. Semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja perangkat daerah serta menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Purwokerto, 16 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyumas



Roni Hidayat, S.STP., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/c)  
NIP. 197609081996021003

## LAMPIRAN

- ❖ Koordinasi Layanan Gerai KPP Pratama Purwokerto dan Bank Jateng Syariah Purwokerto pada hari Rabu tanggal 23 April 2025.

*KPP Pratama Purwokerto*



*Bank Jateng Syariah Purwokerto*



❖ **Forum Komunikasi Masyarakat, Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Berusaha serta Koordinasi tindak lanjut MPP di Kecamatan Kemranjen.**

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan perizinan serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas menggelar rapat Forum Komunikasi Masyarakat, sosialisasi dan fasilitasi perizinan berusaha melalui GelasumikeceMas serta kordinasi tindak lanjut persiapan pelaksanaan kegiatan MPP Keliling



❖ Kegiatan Pelayanan Publik melalui MPP Keliling di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.



❖ Pelaksanaan Kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2025 di Jakarta Convention Center



❖ Pameran Inacraft 2025 di Jakarta Convention Center



- ❖ **Launching Layanan Perizinan PUSKESMAS melalui SIPANJIMAS dan Launching 18 Layanan SIP Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD)**



❖ **Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Banyumas pada Sektor Industri**



- ❖ Pendampingan dan fasilitasi pengisian LKPM dengan metode jemput bola sebagai upaya optimalisasi realisasi pelaporan Penanaman Modal



❖ Forum Investasi Banyumas 2025



❖ **Temu Kemitraan**



❖ Gerakan Legalisasi Usaha Mikro Kecil Banyumas (Gelas Umi Kece Mas)



❖ Pelayanan Perizinan Jemput bola Penyandang Disabilitas (Penjol Pedas)



❖ **Layanan Konsultasi Secara Online dengan Media Zoom Meeting tentang Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Lakonne Terpana)**

